

**ANALISIS PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP KINERJA PERBANKAN KONVENSIONAL
DI INDONESIA
(Studi Pada Perbankan Konvensional Yang Terdaftar Di BEI
Periode 2005 – 2009)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada
Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

LENI NUR PRATIWI

NIM. C2A309019

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Leni Nur Pratiwi
NIM : C2A309019
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Manajemen
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA PERBANKAN KONVENSIONAL DI INDONESIA (Studi Pada Perbankan Konvensional Yang Terdaftar Di BEI Periode 2005 – 2009)**
Dosen Pembimbing : H. Muhamad Syaichu.,SE., MSi

Semarang, 9 Januari 2012

Dosen Pembimbing

(H. Muhamad Syaichu.,SE., MSi)

NIP. 19670720 199903 1002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Leni Nur Pratiwi
NIM : C2A309019
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Manajemen
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA PERBANKAN KONVENSIONAL DI INDONESIA (Studi Pada Perbankan Konvensional Yang Terdaftar Di BEI Periode 2005 – 2009)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 19 Januari 2012

Tim Penguji :

1. H.Muhamad Syaichu,SE., M.Si (.....)

2. Erman Denny Arfianto, SE, MM (.....)

3. Dra. Irene Rini Demi P., ME. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Leni Nur Pratiwi, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **ANALISIS PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERBANKAN KONVENSIONAL DI INDONESIA (Studi Pada Perbankan Konvensional Yang Terdaftar Di BEI Periode 2005 – 2009)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis alin, yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 9 Januari 2012

Yang membuat pernyataan

(Leni Nur Pratiwi)
NIM : C2A309019

MOTA DAN PERSEMBAHAN

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang

**Gunakan Syukurmu, Dan Buang Keluhmu Dalam Menghadapi Setiap
Cobaan, Karena Cobaan Yang Kamu Alami Adalah Sebagai Proses
Pemuliaan.**

Segala Sesuatu Hanya Milik Allah, Dan Akan Kembali Kepadanya

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Zarkasyi Syam Dan Ernelis Anis

Seluruh Kakak Dan Adik Yang Saya Sayangi Dan Saya Hormati

“Semoga Kita Tetap Menjadi Keluarga Yang Utuh Dan Tunduk Pada NYA”

Amin

ABSTRACT

Banking is a very important part in the economy, and governance systems are very complicated. the Asian crisis and several related cases of poor corporate governance that need more attention from the government. This study aims to investigate the effect of corporate governance on the performance of general banking in Indonesia.

Independent variables used in this research is corporate governance which uses four proxies is an Independent Commissioner, Board of Commissioners, Board of Directors and Institutional Ownership, while the dependent variable is firm performance as measured by using proxy ROA. The sample used in this research is the general banking companies in Indonesia. The research data is derived from the annual report in the periode 2005-2009 by using purposive sampling method obtained from the website of the Indonesia Stock Exchange (IDX) and Indonesia Capital Market Directory (ICMD). The analytical method used is multiple linear regression in accordance with the purpose of research which analyzes the influence of independent variables on the dependent variable. Purposive sampling method used to determine the sample selection and obtained 18 samples of commercial banks.

Results of analysis of this study indicate that only the number of member of board of director is significantly positive effect on firm performance (ROA), while the other variable is the percentage of independent commissioner, the number of members of the Board of Commissioners, and percentage Of Institutional Ownership does not have a significant impact on firm performance (ROA).

Keyword: Percentage Of The Independent Commissioner, The Number Of Members Of The Board Of Commissioners And The Number Of Members Of The Board Of Directors, Percentage Of Institutional Ownership, Return On Asset (ROA)

ABSTRAK

Perbankan merupakan bagian yang sangat penting dalam perekonomian, dan sistem tata kelola yang kompleks. Krisis Asia dan beberapa kasus yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan yang buruk sehingga perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja perbankan umum di Indonesia.

Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah *corporate governance* yang diproksikan oleh Komisaris Independen, Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Kepemilikan Institusional, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kinerja perusahaan yang diproksikan oleh ROA. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan konvensional di Indonesia. Data penelitian ini berasal dari *annual report* periode 2005-2009 dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang didapat dari website Bursa Efek Indonesia dan *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD). Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda sesuai dengan tujuan penelitian yang menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode *purposive sampling* digunakan untuk menentukan sampel pilihan dan didapat 18 sampel bank umum.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa hanya jumlah anggota dewan direksi yang berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan (ROA), sedangkan variabel lainnya yaitu persentase Komisaris Independen, jumlah anggota Dewan Komisaris, dan persentase kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA).

Kata kunci: *Persentase Komisaris Independen, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Dewan Direksi, persentase Kepemilikan Institusional dan Return On Asset (ROA)*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perbankan Konvensional Di Indonesia (Periode 2008 – 2009)** dengan baik.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Penulisan Skripsi ini tidak dapat mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, karena atas rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
2. Prof. Drs. Mohamad Nasir, MSi., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
3. Muhammad Syaichu., SE., MSi, selaku dosen pembimbing atas segala arahan dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
4. Drs. H. Mudiantono, MSc selaku dosen wali dan seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro atas semua ilmu pengetahuan yang telah diberikan.
5. Kepada keluarga besarku Mama dan Papa, kakak-kakak dan adik yang selalu memberikan dukungan, perhatian, semangat, kasih sayang yang

begitu melimpah dan doa yang tiada henti untuk mendoakanku agar selalu tetap dijalan Allah SWT.

6. Kepada teman - teman FE UNDIP Manajemen Reg II 2009. Terima kasih telah memberikan banyak kenangan, dukungan dan tempat berdiskusi segala hal, terutama Wuri, Lidya, Riska, Laras, Frans, Adit, Randi, Feri dan Teguh.
7. Kepada sahabat-sahabatku di Jogja (Afra, Uchi, dan Wiwid) yang selalu memberikan dukungan, masukan dan kenangan selama penulisan skripsi ini
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran membangun dari semua pihak. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak

Semarang, 9 Januari 2012

Yang membuat pernyataan

(Leni Nur Pratiwi)
NIM : C2A309019

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori Dan Penelitian Terdahulu	
2.1.1 Pengertian Bank	12
2.1.2 Jenis – Jenis Bank	13
	x

2.1.3	Kepengurusan Bank	15
2.1.4	Risiko Bank	17
2.1.5	Kinerja Bank	20
2.1.6	<i>Agency Theory</i>	24
2.1.7	<i>Corporate Governance</i>	27
2.1.7.1	Pengertian <i>Corporate Governance</i>	27
2.1.7.2	Mekanisme <i>Corporate Governance</i>	31
2.1.7.3	Prinsip <i>Corporate Governance</i>	36
2.1.8	Penelitian Terdahulu	40
2.2	Pengembangan Hipotesis	44
2.2.1	Pengaruh Persentase Jumlah Anggota Komisaris Independen Terhadap Kinerja Perusahaan	44
2.2.2	Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Perusahaan	45
2.2.3	Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Direksi Terhadap Kinerja Perusahaan	46
2.2.4	Pengaruh Persentase Kepemilikan Institusional Terhadap kinerja perusahaan	47
2.3	Kerangka Pemikiran	47
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional	48
3.1.1	Variabel Dependen	48
3.1.2	Variabel Independen	
3.1.2.1	Persentase Komisaris Independen	49
3.1.2.2	Jumlah Anggota Dewan Komisaris	50
3.1.2.3	Jumlah Anggota Dewan Direksi	50
3.1.2.4	Persentase Kepemilikan Institusional	50
3.1.3	Definisi Operasional Variabel	51
3.2	Populasi Dan Sampel	52
3.3	Jenis Dan Sumber Data	54
3.4	Metode Pengumpulan Data	54

3.5	Teknik Analisis	55
3.5.1	Model Penelitian	55
3.5.2	Uji Asumsi Klasik	56
3.5.2.1	Uji Normalitas	56
3.5.2.2	Uji Multikolinearitas	57
3.5.2.3	Uji Autokorelasi	57
3.5.2.4	Uji Heterokedastisitas	58
3.5.3	Pengujian Hipotesis	60
3.5.3.1	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	60
3.5.3.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	60
3.5.3.3	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)	61
BAB IV	HASIL DAN ANALISIS	
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	62
4.2	Analisis Data	63
4.2.1	Analisis Deskriptif	63
4.2.2	Uji Asumsi Klasik	65
4.2.2.1	Uji Normalitas	65
4.2.2.2	Uji Multikolinearitas	68
4.2.2.3	Uji Autokolinearitas	68
	Uji Heterokedastisitas	69
4.2.3	Analisis Regresi Linear Berganda	70
4.2.3.1	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	71
4.2.3.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)	72
4.2.3.3	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji-T)	73
4.3	Pengujian Hipotesis	75
4.3.1	Persentase Komisaris Independen Berpengaruh Secara Positif Kinerja Perusahaan	75
4.3.2	Jumlah Anggota Dewan Komisaris Berpengaruh Secara Positif Terhadap Kinerja Perusahaan	76

4.3.3	Jumlah Anggota Dewan Direksi Berpengaruh Secara Positif Terhadap Kinerja Perusahaan	77
4.3.4	Persentase Kepemilikan Institusional Berpengaruh Secara Positif Terhadap Kinerja Perusahaan	78
4.4	Interpretasi Hasil	78
4.4.1	Variabel Komisaris Independen	79
4.4.2	Variabel Dewan Komisaris	81
4.4.3	Variabel Dewan Direksi	82
4.4.4	Variabel Kepemilikan Institusional	83
BAB V	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan	85
5.2	Keterbatasan	87
5.3	Saran	88
	DAFTAR PUSTAKA	89
	LAMPIRAN	95

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	41
Tabel 3.1 Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel	52
Tabel 4.1 Daftar Perusahaan Perbankan Yang Menjadi Sampel Penelitian Periode 2005-2009	62
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	64
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov	67
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	68
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokolinearitas	69
Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	71
Tabel 4.7 Hasil uji signifikansi simultan (Uji F)	72
Tabel 4.8 Output Persamaan Regresi	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	47
Gambar 4.1	Hasil Uji Normalitas Menggunakan Diagram	68
Gambar 4.2	Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual ...	68
Gambar 4.3	Uji Heterokedastisitas	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Daftar Perusahaan Perbankan Yang Menjadi Sampel Penelitian Periode 2005-2009	95
Lampiran B	Data Sampel Perusahaan dari tahun 2005-2009	96
Lampiran C	Hasil Analisis Regresi SPSS	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.5 LATAR BELAKANG MASALAH

Krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 yang terjadi ASEAN berdampak cukup besar di Indonesia. Pengaruh dari krisis ini pertama kali dirasakan pada sektor keuangan, jasa, dan sektor riil. Perusahaan manufaktur yang *go public* di pasar modal merupakan pihak yang pertama kali merasakan dampak krisis moneter. Pada pertengahan tahun 2008, krisis perekonomian dunia yang terjadi di Amerika berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia. Hal ini terjadi diperkirakan karena beberapa negara yang dilanda krisis ini memiliki kinerja yang buruk dan rendahnya daya saing perusahaan – perusahaan di negara tersebut serta lemahnya regulasi dan sistem operasi pasar keuangan, baik pasar uang maupun pasar modal. Hal tersebut terjadi dikarenakan lemahnya penerapan *corporate governance* di Indonesia.

Dalam menanggapi kondisi tersebut, Bank Indonesia memberi perhatian lebih dalam tata kelola perbankan di Indonesia. Hal ini terlihat dari pembenahan fundamental dalam Perbankan Indonesia melalui Arsitektur Perbankan Indonesia (API) pada tahun 2004. Arsitektur Perbankan Indonesia atau API merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi

mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Arsitektur Perbankan Indonesia memiliki 6 (enam) pilar salah satunya adalah menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional yang terletak pada pilar ke IV. Selain itu juga, pada tahun 2006 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan yang berhubungan dengan *corporate governance* pada Bank Umum yaitu PBI No 8/4/2006 yang kemudian direvisi menjadi PBI No 8/14/2006.

Penelitian *Corporate governance* mulai dilakukan untuk memaparkan konsekuensi negatif dari sistem tata kelola (*governance system*), sehingga perlu diidentifikasi faktor-faktor penentu yang dapat meningkatkan implementasi *corporate governance*. *Corporate governance* merupakan solusi yang ditawarkan oleh *agency theory* untuk membantu hubungan pemilik dan manajer, dan diharapkan dengan penerapannya dapat memberikan kepercayaan terhadap *agent* (manajemen) dalam mengelola kekayaan *principal* (investor), dan *principal* menjadi lebih yakin bahwa *agent* tidak akan melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan *agent*.

Riset *The Indonesian Institute For Corporate Governance* (IICG) (2002), menemukan bahwa alasan utama perusahaan menerapkan *good corporate governance* adalah kepatuhan terhadap peraturan. Perusahaan meyakini bahwa implementasi *good corporate governance* merupakan bentuk lain penegakan etika bisnis dan etika kerja yang sudah lama menjadi komitmen perusahaan, dan implementasi *corporate governance* berhubungan dengan peningkatan citra

perusahaan. Perusahaan yang mempraktikkan *good corporate governance*, akan mengalami perbaikan citra dan peningkatan kinerja perusahaan sehingga pada penelitian ini penulis ingin menganalisis pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan.

Beberapa penelitian tentang pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja atau nilai perusahaan. Sam'ani (2008) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai *poor performance* disebabkan oleh *poor governance*. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Klapper and Love (2002:18) yang menemukan hubungan signifikan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur menggunakan ROA.

Walsh dan Seward, (1990 : 421-458) berpendapat terdapat dua mekanisme untuk membantu perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham yaitu mekanisme pengendalian internal dan mekanisme pengendalian pasar. Mekanisme *corporate governance* diperlukan untuk mensejajarkan kepentingan antara manajer dengan para pemegang saham karena adanya kepentingan atau keinginan yang berbeda-beda (adanya konflik keagenan).

Pada penelitian ini, mekanisme *corporate governance* yang akan dikaji terdiri dari komisaris independen, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan kepemilikan institusional. Peneliti memilih komponen ini karena memiliki pengaruh langsung terhadap pelaksanaan *corporate governance* dimana keempat komponen tersebut memiliki tugas mengawasi dan mengontrol perusahaan secara langsung sehingga dapat meminimalisir *agency cost* yang mungkin akan terjadi akibat perbedaan kepentingan.

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan bahwa semakin banyak jumlah pemonitor maka kemungkinan terjadi konflik semakin rendah dan akhirnya akan menurunkan *agency cost*. Hal ini dapat menumbuhkan tingkat kepercayaan investor, pihak ketiga terhadap perusahaan. Pihak independen ini dapat berperan sebagai agen pengawas yang efektif untuk mengurangi masalah keagenan, karena mereka dapat mengendalikan perilaku oportunistik manajer. Beberapa penelitian yang mengenai hubungan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan yaitu Trisianto (2009) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara proporsi komisaris independen terhadap tingkat penilaian kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa semakin bertambahnya proporsi komisiaris independen maka kinerja perusahaan juga akan meningkat. Choi, Park, and and Yoo (2006), Menyatakan bahwa komisairis independen berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA. Penelitian tersebut bertentangan dengan peneltian yang dilakukan oleh Irmala Sari (2010) yang menganalisis hubungan *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan ROA dan sampel yang digunakan adalah perbankan di Indonesia yang telah *go public*. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara statistik komisaris independen berpengaruh signifikan dan negatif terhadap

ROA sebagai proksi kinerja perusahaan. Hal ini didukung oleh Bhagat dan Bolton (2007), yang menyatakan bahwa komisaris independen memiliki hubungan yang negatif terhadap kinerja perusahaan yang diukur menggunakan ROA.

Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG (KNKG, 2006). Collier dan Gregory (1999) berpendapat bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, semakin mudah untuk mengendalikan *Chief Executives Officer* (CEO) dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen. Jaafar dan El-Shawa (2009) menemukan bahwa ukuran dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA dan Tobin's Q. Penelitian tersebut didukung oleh Irmala Sari (2010) yang menunjukkan bahwa secara statistik jumlah dewan komisaris berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ROA sebagai proksi kinerja perusahaan. Penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Eisenberg *et al* yang menemukan bahwa terdapat hubungan signifikan dan negatif antara ukuran dewan dengan kinerja perusahaan. Penelitian ini didukung oleh Chaing dan Chia (2005) yang meneliti hubungan antara praktek *Corporate Governance* yang dilakukan terhadap kinerja perusahaan pada 225 perusahaan publik di Taiwan. *Corporate Governance* sebagai variabel independen penelitian di *proxy* kan dengan ukuran dewan komisaris, sedangkan kinerja perusahaan sebagai variabel dependen penelitian diproxykan dengan ROA, ROE, dan EPS. Salah satu hasil yang

diperoleh adalah ukuran dewan komisiaris berpengaruh negatif terhadap ROA, ROE, dan EPS.

Dewan direksi bertugas menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi jangka panjang maupun jangka pendek. Penelitian mengenai pengaruh ukuran dan komposisi dewan direksi dalam perusahaan telah banyak dilakukan. Beberapa diantaranya adalah Bennedsen, Kongsted dan Nielsen (2004), dalam analisisnya pada perusahaan kecil dan menengah di Denmark melaporkan bahwa ukuran dewan tidak berpengaruh pada kinerja pada ukuran dewan di bawah enam anggota tetapi menemukan hubungan negatif dan signifikan antara kedua ketika ukuran dewan meningkat menjadi tujuh anggota atau lebih. Eisenberg et al (1998) juga berpendapat sama yaitu terdapat hubungan yang signifikan negatif antara ukuran dewan direksi dan kinerja perusahaan. Penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Sam'ani (2008) yang menyatakan ukuran dewan direksi secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja.

Kepemilikan saham oleh institusi atau disebut juga kepemilikan institusional. Konsentrasi kepemilikan institusional meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan yang berupa meningkatnya volume perdagangan saham dan kenaikan harga saham merupakan cerminan meningkatnya kepercayaan publik terhadap perusahaan. Hal ini berarti menunjukkan bahwa kepemilikan institusional menjadi mekanisme yang handal sehingga mampu memotivasi manajer dalam meningkatkan kinerjanya. Penelitian yang dilakukan oleh Pound (1988) menemukan bahwa adanya hubungan positif antara kepemilikan saham institusional dan kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan ROA.

Penelitian tersebut tidak didukung oleh Bhattacharya dan Graham yang menemukan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan.

1.6 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan rumusan masalah penelitian yaitu terjadi *research gap* (kesenjangan penelitian) dalam penelitian-penelitian sebelumnya yaitu komisaris independen, dewan komisaris, dewan direksi, dan kepemilikan institusional sebagai variabel pengukur *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana pengaruh persentase jumlah anggota komisaris independen terhadap *Return On Asset* ?
2. Bagaimana pengaruh jumlah anggota dewan komisaris terhadap *Return On Asset* ?
3. Bagaimana pengaruh jumlah anggota dewan direksi terhadap *Return On Asset*?
4. Bagaimana pengaruh persentase kepemilikan institusional terhadap *Return On Asset*?

1.7 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1.7.1 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui hubungan mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja perbankan yang diukur dengan menggunakan *Return On Asset* yang terbagi atasempat (4) variabel, yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh jumlah anggota komisaris independen terhadap *Return On Asset*.
2. Menganalisis pengaruh jumlah anggota dewan komisaris terhadap *Return On Asset*.
3. Menganalisis pengaruh jumlah anggota dewan direksi terhadap *Return On Asset*.
4. Menganalisis pengaruh persentase kepemilikan institusional terhadap *Return On Asset?*

1.7.2 Manfaat penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada:

1. Bagi penulis: dapat dijadikan sebagai penambah pengetahuan, khususnya mengenai pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan (*Return On Asset*).
2. Bagi ilmu pengetahuan: dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut.

3. Bagi perusahaan: dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya *good corporate governance* bagi perusahaan.

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori yang digunakan sebagai dasar acuan teori bagi penelitian, penelitian – penelitian terdahulu, kerangka pemikiran untuk penelitian dan hipotesis yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai variabel–variabel penelitian (variabel independen dan variabel dependen) dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis data yang digunakan untuk penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis untuk penelitian.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan yang dilakukan sesuai dengan alat analisis yang digunakan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari analisis atau pembahasan yang telah dilakukan, keterbatasan dan saran-saran untuk penelitian serupa di masa yang akan datang.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.4 LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU

2.4.1 Pengertian Bank

Pada pasal 1 UU No 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan baik bank berprinsip syariah maupun bank konvensional. Berikut pengertian perbankan dalam Undang-Undang tersebut, yaitu :

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
4. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

Beberapa definisi bank dari sumber lain (Dendawiya, 2000:25) :

1. Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana pada waktu tertentu.
2. Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.
3. Bank adalah badan yang usaha utamanya menciptakan.
4. Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.

2.4.2 Jenis-Jenis Bank

Jenis atau bentuk bank bermacam-macam yang terbagi berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Formalitas berdasarkan undang undang
2. Kepemilikan
3. Kegiatan usaha
4. Pembayaran bunga atau pembagian hasil usaha.

Jenis bank Berdasarkan undang-undang terdapat pada pasal 5 UU No 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan, yaitu:

1. Bank umum
2. Bank perkreditan rakyat

Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian lebih besar kepada kegiatan tertentu.

Jenis bank berdasarkan kepemilikannya terdiri dari :

1. Bank milik negara (BUMN)
2. Bank milik pemerintah daerah (BUMD)
3. Bank milik swasta nasional
4. Bank milik swasta campuran (nasional dan asing)
5. Bank milik asing (cabang atau perwakilan)

Jenis bank berdasarkan penekanan kegiatan usaha, antara lain :

1. Bank retail (*retail banks*)
2. Bank korporasi (*corporate banks*)
3. Bank komersial (*commercial banks*)
4. Bank pedesaan (*rural banks*)
5. Bank pembangunan (*development banks*)
6. Dan lain-lain

Jenis bank berdasarkan pembayaran bunga ataukah pembagian hasil, terdiri dari :

1. Bank konvensional
2. Bank berdasarkan prinsip syariah

2.4.3 Kepengurusan Bank Umum

Kepengurusan Bank Umum terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Jenis-jenis kepengurusan Bank Umum tercantum pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, yang terdiri dari sebagai berikut:

1. Dewan komisaris. Anggota dewan komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (pasal 4 dan 5):
 - a. Anggota dewan komisaris yang dipilih harus disetujui oleh Bank Indonesia; tidak termasuk dalam pemegang saham dan atau pengurus bank dan atau BPR sesuai dengan ketentuan BI; dan Tidak memiliki hubungan keluarga, sampai derajat kedua dengan sesama anggota dewan komisaris.
 - b. Jumlah anggota dewan komisaris minimal 2 orang, terdiri dari komisaris dan komisaris independen, berdomisili di Indonesia. Jumlah anggota Komisaris independen minimal 50% dari anggota dewan komisaris.
2. Dewan direksi. Anggota dewan direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut antara lain (pasal 19, 23 dan 24):
 - a. Anggota dewan direksi yang dipilih harus disetujui oleh Bank Indonesia; tidak termasuk dalam pemegang saham dan atau pengurus bank dan atau BPR sesuai dengan ketentuan BI; dilarang merangkap jabatan sebagai dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain; dan Tidak memiliki hubungan keluarga,

sampai derajat kedua dengan sesama anggota direksi atau anggota dewan komisaris.

- b. Jumlah anggota dewan direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun sebagai pejabat eksekutif pada bank.
- c. Anggota direksi dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain.

Berdasarkan pada PBI No 8/4/2006, tercantum dalam pasal 8 sampai dengan 11 tugas dan tanggung jawab dari dewan komisaris adalah sebagai berikut antara lain :

1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:

- a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank yang berlaku.
5. Pengambilan keputusan oleh dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

Tanggung jawab dan kewajiban Dewan Direksi tercantum pada bagian kedua PBI No 8/4/2006, antara lain :

1. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
2. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Direksi paling kurang wajib membentuk: Satuan Kerja Audit Intern; Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan Satuan Kerja Kepatuhan.

2.4.4 Risiko Bank

Bank Indonesia mendefinisikan risiko bank merupakan potensi terjadi suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank sehingga pihak BI pun mengeluarkan kebijakan mengenai manajemen risiko untuk meminimalisir terjadinya risiko. Berdasarkan ketetapan dalam Peraturan Bank

Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tahun 2003 tentang penerapan manajemen risiko bank umum, risiko-risiko yang dihadapi bank dan harus diwaspadai dan diantisipasi oleh bank dibedakan kedalam delapan jenis risiko, yaitu sebagai berikut :

1. Risiko kredit (*credit atau default risk*). Suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diperoleh dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan.
2. Risiko pasar (*market risk*). Risiko yang timbul akibat pergerakan variabel pasar dari portfolio yang dimiliki bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar, sehingga dari risiko ini akan menimbulkan risiko investasi, risiko tingkat bunga, risiko valuta asing.
3. Risiko likuiditas (*liquidity risk*). Risiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi permintaan kredit dan semua penarikan dana oleh penabung pada suatu waktu.
4. Risiko operasional (*operating risk*). Risiko yang terjadi akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
5. Risiko hukum (*legal risk*). Risiko yang disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketidadaan peraturan

perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak.

6. Risiko reputasi. Risiko yang diakibatkan adanya publikasi negatif yang reaktif dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.
7. Risiko strategik. Risiko yang diakibatkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategik bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.
8. Risiko kepatuhan. Risiko yang disebabkan ketidakpatuhan bank atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Ketentuan penerapan manajemen risiko untuk semua jenis risiko tidak semua berlaku bagi setiap bank. Bank yang memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh risiko tersebut. Sementara bagi bank yang tidak memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi wajib menerapkan manajemen risiko sekurang-kurangnya empat jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional (Siamat, 2005).

The Federal Reserve Board mengidentifikasi risiko menjadi enam jenis yaitu *credit risk*, *liquidity risk*, *market risk*, *operating risk*, *reputation risk*, dan *legal risk*. *The Comptroller Of The Currency* (OCC) menggunakan sembilan risiko yaitu dengan memasukan *divided into price risk*, *interest rate risk*, dan *foreign exchange risk*. (Koch dan MacDonald, 2000: 121).

2.4.5 Kinerja Perbankan

Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya. Menurut Keats et al (1998), Kinerja merupakan konsep yang sulit, baik definisi maupun dalam pengukurannya, karena sebagai sebuah konstruk, kinerja bersifat multidimensional dan oleh karena itu pengukuran dengan menggunakan dimensi pengukuran tunggal tidak mampu memberikan pemahaman yang komprehensif.

Beiner et al (2003), Jensen (1993) serta Lipton dan Lorsh (1992) menjelaskan bahwa kinerja perusahaan merupakan hasil dari tindakan direktur. Kinerja perusahaan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba (Sucipto, 2003). Helfert (1994:67) menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen. Kinerja perusahaan adalah prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan dari perusahaan tersebut.

Kinerja perbankan menurut Greve, (1998:69) merupakan konstruk yang kompleks bagi perusahaan. Kinerja yang dianggap baik belum tentu dianggap baik oleh pemilik perusahaan atau karyawan. Covusgil dan Zou (1994) mendefinisikan kinerja perbankan sebagai seberapa jauh tujuan perusahaan, baik ekonomi dan strategis, sehubungan dengan produk perbankan ke pasar asing,

untuk mencapainya melalui perencanaan dan pelaksanaan. Aaby dan Slater (1989) serta Katsikeas, Piercy dan Ionnidis (1996) mendefinikan kinerja perbankan dinilai dalam kaitannya dengan sejauh mana perusahaan-perusahaan perbankan mencapai tujuan mereka. Shoman (1996) memberikan batasan tentang kinerja perbankan sebagai variabel dependen pada model sederhana dan dijelaskan sebagai hasil dari kegiatan perusahaan di pasar perbankan.

Kinerja perusahaan dapat dinilai dari laporan keuangan yang dikeluarkan secara periodik, laporan berupa neraca, rugi laba, arus kas, dan perubahan modal yang secara bersama-sama memberikan suatu gambaran tentang posisi keuangan perusahaan. Pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik gambaran perusahaan yang berupa kegiatan operasional, struktur organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 2001). Rifai (2009: 24-25), berpendapat bahwa pengukuran kinerja hendaknya menggunakan atau mengintegrasikan dimensi pengukuran yang beragam, sampai saat ini masih muncul perdebatan tentang pendekatan yang tepat bagi konseptualisasi dan pengukuran kinerja organisasi sehingga untuk menjamin tercapainya kinerja tersebut, para manajer harus merancang ukuran-ukuran hasil yang diinginkan. Suatu pengukuran adalah nilai kuantitatif yang dapat digunakan untuk menjadi skala dan tujuan-tujuan perbandingan. Pengukuran kinerja dapat berupa keuangan dan bukan keuangan. Pengukuran keuangan dinyatakan dalam ketentuan moneter sedangkan pengukuran bukan keuangan adalah data kuantitatif yang diciptakan diluar sistem akuntansi yang formal. Pengukuran kinerja dapat menggunakan rasio keuangan yang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pengukuran kinerja konvensional

Dalam manajemen konvensional, pencapaian visi misi organisasi sebagai institusi pencipta kekayaan diukur hanya dgn menggunakan ukuran keuangan yang berasal dari laporan keuangan terutama neraca dan laba rugi yang merupakan data keuangan historis dan hasil realisasi anggaran.

2. Pengukuran kinerja kontemporer

Dalam perkembangan terdapat 2 (dua) konsep pengukuran kinerja kontemporer yaitu :

- a. EVA : nilai tambah ekonomis yang diciptakan perusahaan dari kegiatan atau strategisnya selama periode tertentu
- b. *Balance score card* (BCS) adalah suatu alat untuk mengukur kinerja eksekutif dimasa depan yang mencakup aspek keuangan dan non keuangan. Pengukuran kinerja keuangan pada sektor perbankan ini menggunakan pengukuran kinerja konvensional yang diukur dengan berdasarkan pada nilai rasio-rasio keuangan yaitu CAR, RORA, NIM, BOPO, dan LDR

Analisis rasio keuangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh gambaran perkembangan finansial dan posisi finansial perusahaan. Analisis rasio keuangan berguna sebagai analisis *intern* bagi manajemen perusahaan untuk mengetahui hasil finansial yang telah dicapai guna perencanaan yang akan datang dan juga untuk analisis intern bagi kreditor dan investor untuk menentukan kebijakan pemberian kredit dan penanaman modal suatu perusahaan (Usman, 2003). Beberapa rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan (Hanafi, 2004):

1. Rasio likuiditas. Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek.
2. Rasio aktivitas. Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menggunakan asetnya dengan efisien.
3. Rasio profitabilitas. Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan atau laba.
4. Rasio solvabilitas atau *leverage*. Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi total kewajibannya.
5. Rasio pasar. Rasio yang mengukur prestasi pasar relatif terhadap nilai buku, pendapatan, atau dividen.

Pada Lampiran 14 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang Pedoman Perhitungan Rasio Keuangan, salah satu rasio yang dipakai adalah *Return On Average Assets*. Rasio ini menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan, dan merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Rasio ini juga, menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri (Kasmir, 2008:202). Menurut Semakin tinggi rasio ini, semakin baik, yang berarti semakin efektif dan efisiennya pengelolaan aset oleh perusahaan (Hanafi, 2004:42). Berikut rumus ROA berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP Lampiran 14.

$$\mathbf{Return\ On\ Assets\ (ROA)} = \frac{\mathbf{Laba\ Sebelum\ Pajak}}{\mathbf{Rata - Rata\ Total\ Aset}} \quad \mathbf{.....\ (2.1)}$$

Keterangan :

Laba sebelum pajak disetahunkan misal posisi periode yang nilai adalah bulan Juni maka, laba sebelum pajak = (akumulasi laba perposisi Juni dibagi 6) x 12. Sementara rata-rata total aset = (penjumlahan total aset pada posisi Januari s/d Juni) / 6.

2.4.6 Agency Theory

Agency Theory merupakan suatu teori yang menekankan pada pemisahan kepemilikan perusahaan (*principal*) dengan manajemen (*agen*). Jensen dan Meckling (1976:5) menyatakan bahwa suatu hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu atau lebih orang (*principal*) melibatkan orang lain (*agen*) untuk menjalankan usaha atas nama mereka (*principal*) dan melibatkan pendelegasian sebagian kewenangan dalam pengambilan keputusan kepada *agen*. Jika kedua pihak memiliki hubungan memaksimalkan kegunaan (*utility maximizers*) merupakan alasan baik untuk percaya bahwa *agen* tidak akan selalu bertindak dalam kepentingan terbaik prinsipal.

Dalam hubungan antara *agen* dan *principal* dibutuhkan kepercayaan yang kuat, dimana si *agent* (manajemen perusahaan) melaporkan segala informasi tentang perkembangan perusahaan yang dimiliki oleh *principal* melalui informasi akuntansi (misalnya, laporan keuangan) karena hanya pihak manajemen yang mengetahui dengan pasti tentang keadaan perusahaan. Akan tetapi, dengan pemisahan ini dapat menimbulkan suatu konflik antar keduanya yang disebabkan ketika kepentingan manajemen (*agent*) tak lagi sejalan dengan kepentingan

pemilik (*principal*) yaitu meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya keleluasaan pengelola manajemen perusahaan untuk memaksimalkan kepentingan pengelolanya sendiri dengan beban dan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan. Pemisahan ini juga dapat menimbulkan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana pada perusahaan serta keseimbangan yang tepat antara kepentingan-kepentingan yang ada, misalnya antara pemegang saham dengan pengelola manajemen perusahaan dan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas.

Hanafi (2004:17), menyatakan bahwa teori keagenan (*agency theory*) mengatakan perusahaan bisa dilihat sebagai serangkaian kontrak antara pihak-pihak yang berkaitan. Tiga bentuk kontrak yang sering dibicarakan dalam manajemen keuangan, yaitu (1) kontrak antara manajer dengan pemegang saham, (2) kontrak antara pemegang saham dengan pemegang utang, dan (3) kontrak antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Pihak – pihak tersebut mempunyai potensi konflik satu sama lain, karena masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda, yang bisa tidak konsisten satu sama lain.

Eisenhardt (1989:59), menyatakan bahwa teori keagenan dilandasi dengan tiga asumsi yaitu pertama, asumsi sifat dasar manusia (*human assumptions*) guna menjelaskan tentang teori agensi yaitu: manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). Asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat *opportunistic*, yaitu

mengutamakan kepentingan pribadinya. Kedua, asumsi keorganisasian (*organizational assumptions*), terbagi atas tiga bagian, yaitu konflik sebagian tujuan antar partisipan, efisiensi sebagai suatu kriteria efektivitas, dan asimetri informasi antara pemilik dan agen. Ketiga, asumsi informasi (*information assumptions*) merupakan asumsi yang menyatakan bahwa informasi merupakan suatu komoditas yang dapat dibeli. Teori keagenan lebih menekankan pada penentuan pengaturan kontrol yang efisiensi dalam hubungan pemilik dengan agen. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang jelas untuk masing-masing pihak yang berisi tentang hak dan kewajiban, sehingga dapat meminimumkan konflik keagenan.

Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan (Darmawati, dkk. 2004). Shleifer dan Vishny (1996:2) menyatakan bahwa *Corporate governance* sangat berkaitan dengan cara *agent* meyakinkan para investor bahwa mereka mampu memberikan keuntungan atas dana yang diberikan, bagaimana manajer meyakinkan para investor bahwa mereka tidak akan mencuri/ menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek - proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor dan bagaimana *agent* mengontrol dana yang diberikan.

2.4.7 *Corporate Governance*

2.4.7.1 *Pengertian Corporate Governance*

Corporate governance, telah dijelaskan pada bab sebelumnya, merupakan solusi yang ditawarkan oleh *agency theory* untuk membantu hubungan pemilik dan manajer, dan meyakinkan *principal* bahwa *agent* tidak akan melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan *agent*. Solomon (2007:12) pada bukunya *corporate governance and accountability*, mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem *checks and balances*, baik perusahaan internal dan eksternal, yang memastikan bahwa perusahaan memenuhi kewajiban mereka untuk melaporkan kepada seluruh stakeholder dan bertindak bertanggung jawab secara sosial di semua bidang bisnis mereka. Beberapa peneliti mendefinisikan *corporate governance* dalam Solomon, 2007:

1. Prowson (1998:115), *Corporate governance* adalah alat bagi investor luar perusahaan (kreditur dan pemegang saham) memastikan bahwa para manajer, atau orang dalam perusahaan, bertindak dalam kepentingan terbaik mereka.
2. Parkinson (1994), *Corporate governance* adalah proses pengawasan dan pengendalian dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.
3. Tricker (1984), *Corporate governance* adalah peran *governance* tidak dengan menjalankan bisnis perusahaan *per se*, tetapi untuk perusahaan secara keseluruhan, mengawasi dan mengendalikan tindakan eksekutif manajemen dan dengan memuaskan harapan yang sah dari akuntabilitas dan regulasi oleh kepentingan luar perusahaan batas.

4. Cannon (1994), *Corporate Governance* adalah jumlah kegiatan-kegiatan yang membentuk aturan perusahaan sesuai dengan kewajiban perusahaan di bawah hukum kepemilikan dan kontrol. Ini menggabungkan kontrol aset, manajemen dan penyebaran.
5. *The Corporate Governance Handbook* (1996), *Corporate governance* adalah hubungan antara pemegang saham perusahaan mereka dan bagaimana mereka bertindak sebagai pemegang saham untuk mendorong praktik yang lebih baik (misalnya, dengan memberikan suara dalam RUPS dan pertemuan rutin dengan para manajer perusahaan). Suatu peningkatan ini termasuk 'aktivisme' pemegang saham yang merupakan kampanye oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham untuk efek perubahan dalam bisnis.
6. Keasey dan Wright (1993), *Corporate governance* adalah struktur, proses, budaya dan sistem yang mengarah pada keberhasilan operasi organisasi).

Beberapa definisi corporate governance menurut beberapa peneliti, antara lain sebagai berikut:

1. Syakhroza (2002:5) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu sistem yang dipakai dewan untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi (*directing, controlling, dan supervising*) pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif – E3P dengan prinsip-prinsip *transparan, accountable, responsible, independent, dan fairness* – TARIF dalam rangka mencapai tujuan organisasi”.

2. Shleifer dan Vishny (1996:2) menyatakan bahwa *corporate governance* berkaitan dengan mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh return yang sesuai dengan investasi yang telah ditanam.
3. Iskandar, dkk (1999) menyatakan bahwa *corporate governance* merujuk pada kerangka aturan dan peraturan yang memungkinkan stakeholders untuk membuat perusahaan memaksimalkan nilai dan untuk memperoleh return.

Definisi *corporate governance* menurut beberapa organisasi, adalah sebagai berikut :

1. *The Organization for Economic Corporation and Development* (1999), mendefinisikan *corporate governance* yaitu “Sistem dimana perusahaan bisnis diarahkan dan dikontrol. Struktur *corporate governance* perusahaan menetapkan pembagian hak dan tanggung jawab di antara peserta yang berbeda dalam perusahaan, seperti dewan, manajer, *shareholder* dan *stakeholder* lainnya, serta hukum dan menetapkan aturan dan prosedur pengambilan keputusan Umum. Dalam melakukan hal itu juga memberikan struktur yang diatur pada tujuan perusahaan dan bagaimana untuk mencapai tujuan-tujuan dan memantau kinerja”.
2. *Corporate governance* menurut *Forum For Corporate Governance In Indonesia* (FCGI) didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham, kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan.

3. *The Indonesian Institute For Corporate Governance* (IICG, 2000), yaitu suatu proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder yang lain.
4. *The Cadbury Report* (1992) (dikutip dari Solomon, 2007), mengatakan bahwa *Good Corporate Governance* adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan.
5. *Center For European Policy Study*, memformulasikan GCG adalah seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses dan pengendalian (*control*) baik yang ada didalam maupun diluar manajemen perusahaan. Hak yang dimaksud di sini adalah hak dari seluruh *stakeholders* dan bukan hanya terbatas kepada satu *stakeholders* saja.

Berdasarkan definisi tersebut nampak jelas bahwa *corporate governance* merupakan upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara baik, untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan hak dan kewajiban masing-masing.

Forum Corporate Governance Indonesia (FCGI, 2001) mengatakan bahwa dalam penerapan GCG, perusahaan akan mendapatkan empat manfaat besar yaitu (1) mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigit (karena kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*, (2) meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta

lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*, (3) mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan (4) pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders' value* dan dividen. Penerapan GCG itu sendiri pada intinya harus mampu mendorong pengelolaan perusahaan menjadi lebih baik serta diharapkan mempunyai pengaruh yang positif terhadap peningkatan nilai perusahaan.

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya GCG merupakan:

- a. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan para *stakeholder* lainnya.
- b. Suatu sistem pengecekan (*check*) dan perimbangan (*balance*) kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi mucnuculnya dua peluang : pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
- c. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya.

2.4.7.2 Mekanisme Corporate Governance

Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan baik yang melakukan kontrol/ pengawasan terhadap keputusan tersebut. Walsh dan Seward, (1990 : 421-458) berpendapat terdapat dua mekanisme untuk membantu perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham yaitu

mekanisme pengendalian internal dan mekanisme pengendalian pasar. Mekanisme *corporate governance* diperlukan untuk mensejajarkan kepentingan antara manajer dengan para pemegang saham karena adanya kepentingan atau keinginan yang berbeda-beda (adanya konflik keagenan).

Mekanisme pengendalian internal didesain untuk menyamakan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Konflik insentif jangka panjang ini dilakukan dengan memberi insentif para manajer apabila nilai perusahaan atau kemakmuran pemegang saham meningkat sehingga dengan demikian Manajer akan meningkatkan nilai perusahaan atau meningkatkan kemakmuran pemegang saham karena juga akan meningkatkan kekayaan manajer.

Mekanisme pengendalian eksternal adalah pengendalian yang dilakukan oleh pasar. Pasar pengendalian perusahaan merupakan cara terakhir yang dilakukan setelah pengendalian internal tidak berhasil, sehingga apabila manajemen puncak bertindak hanya untuk kepentingan pribadinya, maka kinerja perusahaan yang direfleksikan oleh nilai perusahaan akan menurun.

Iskandar & Chamlao (2000), (dikutip dari Lastanti, 2004) berpendapat bahwa mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* dibagi dalam dua kelompok yaitu mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme Internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Mekanisme eksternal adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan

mekanisme internal, seperti pengendalian perusahaan dan mekanisme pasar. Babic (2001) dalam Nuryaman (2008) mekanisme CG dapat berupa mekanisme internal yaitu struktur kepemilikan, struktur dewan komisaris, kompensasi eksekutif, struktur bisnis multidivisi. Mekanisme eksternal yaitu pengendalian oleh pasar, kepemilikan institusional, dan pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.

Adel Bino & Shorouq Tomar, mengatakan bahwa ada perbedaan dalam mekanisme pemantauan perusahaan-perusahaan perbankan dan non-bank dengan menganalisis *corporate governance* dari perusahaan perbankan yang terdaftar di sembilan negara berkembang Asia. Mekanisme *corporate governance* yang berfungsi untuk memantau perusahaan-perusahaan perbankan diklasifikasikan menjadi tiga yaitu pertama, mekanisme pemantauan kepemilikan (pemegang saham besar, kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing). Kedua, mekanisme pemantauan pengendalian internal (CEO duality, ukuran dewan, dewan independen). Ketiga, mekanisme pemantauan regulasi dan keempat, mekanisme pengungkapan pemantauan.

Basel Committee on Banking Supervision-Federal Reserve, menyatakan bahwa strategi dan teknik yang didasarkan pada Prinsip-prinsip OECD (Brigham dan Erhardt, 2005), yang merupakan dasar untuk melaksanakan tata kelola perusahaan meliputi:

- a) Nilai-nilai perusahaan, kode etik dan perilaku lain yang sesuai standar dan sistem yang digunakan untuk memastikan kepatuhan mereka.
- b) Pembentukan mekanisme untuk interaksi dan kerjasama di antara dewan direksi, manajemen senior, dan para auditor.

- c) Sistem pengendalian internal yang kuat, termasuk fungsi-fungsi audit internal dan eksternal, manajemen risiko fungsi independen dari lini bisnis, dan *check and balance* lainnya.

Pada penelitian ini, indikator *corporate governance* yang digunakan adalah persentase jumlah anggota komisaris independen, jumlah anggota dewan komisaris, dan jumlah anggota dewan direksi sebagai mekanisme internal, serta persentase kepemilikan institusional sebagai mekanisme eksternal.

1. Persentase Jumlah Anggota Komisaris Indenpenden

Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan akan menjadi pihak yang tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, dewan komisaris lain, dan perusahaan itu sendiri. Dalam PBI 8/4/2006 menyatakan bahwa proporsi komisaris independen minimal 50% dari total anggota dewan komisaris perusahaan.

2. Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Pembentukan dewan komisaris merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk memonitor kinerja manajer. Secara hukum dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi. Dalam melakukan pemantauan terhadap direksi, dewan komisaris memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank (SKAI), auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya harus mampu mengawasi dipenuhinya kepentingan semua *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan,

serta mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. Ukuran dewan komisaris menentukan tingkat keefektifan pemantauan kinerja bank.

3. Jumlah Anggota Dewan Direksi

Dalam rangka pemantauan terhadap pengendalian internal bank, direksi mempunyai tanggung jawab menetapkan kebijakan, strategi serta prosedur pengendalian intern; melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh dewan komisaris; memelihara suatu struktur organisasi; memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif yang didukung penerapan akuntabilitas yang konsisten dan memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern. Peningkatan ukuran dan diversitas dari dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja bank karena akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya *network* dengan pihak luar perusahaan dan ketersediaan sumber daya (Pfefer, 1973; Pearce & Zahra, 1992 dalam Faisal, 2005).

4. Persentase Kepemilikan Intitusional

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga, dapat mengurangi adanya manipulasi laba. Tingginya kepemilikan saham oleh institusi dapat memberikan pengaruh terhadap proses penyusunan laporan keuangan yang pada akhirnya diharapkan laporan laba yang dihasilkan juga baik.

2.4.7.3 Prinsip Corporate Governance

The Organization for Economic Corporation and Development (OECD), April 1998, menerbitkan seperangkat prinsip *corporate governance* yang dikembangkan seuniversal mungkin yang kemudian di jadikan pedoman oleh semua Negara atau perusahaan, tetapi tetap diselaraskan dengan sistem hukum, aturan, atau nilai yang berlaku di negara masing-masing. Prinsip – prinsip *good corporate governance* yang dikembangkan meliputi lima (5) hal sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak – hak pemegang saham. Hak – hak tersebut meliputi hak – hal dasar pemegang saham, yaitu hak untuk (1) menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan, (2) mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya, (3) memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur, (4) ikut berperan dan memberikan suara dalam RUPS, (5) memilih anggota dewan komisaris dan direksi, serta (6) memperoleh pembagian keuntungan perusahaan.

2. Persamaan perlakuan seluruh pemegang saham

Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. seluruh pemegang saham harus memiliki, kesempatan untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak mereka. Prinsip ini juga mensyaratkan adanya perlakuan yang sama atas

saham-saham yang berada dalam satu kelas, melarang praktek-praktek *insider trading* dan *self deadling*, dan mengharuskan anggota dewan komisaris untuk melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*).

3. Peranan *stakeholders* yang terkait dengan perusahaan

Kerangka *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders*, seperti ditentukan dalam undang-undang, dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para *stakeholders* tersebut dalam rangka menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan kesinambungan usaha.

4. Keterbukaan dan transparansi

Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. disamping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.

5. Akuntabilitas dewan komisaris (*board of directors*)

Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang dilakukan oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komsaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.

Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajiban – kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

PBI 2006 menetapkan prinsip-prinsip GCG yang dikenal dengan sebutan TARIF, yaitu terdiri atas *transparancy*, *accuntability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*. Lima (5) prinsip tersebut sepaham atau sejalan dengan pedoman GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2000. Pengertian dan pemahaman dari prinsip-prinsip tersebut lebih rinci adalah sebagai berikut :

1. *Transparancy*, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
 - a. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.
 - b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurusan, pemegang saham pengendalian, *cross shareholding*, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (*risk management*), sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi bank.

- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
 - d. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
2. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- a. Bank harus menetapkan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
 - b. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
 - c. Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan bank.
 - d. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran – ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki *reward and punishment system*.
3. *Responsibility*, yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

4. *Independency*, yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh / tekanan dari pihak manapun.
 - a. Untuk menjaga kelanngsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.
 - b. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
5. *Fairness*, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - a. Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
 - b. Bank dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

2.4.8 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti hubungan *good corporate governance* dengan kinerja perusahaan, dirangkum pada Tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Deni Darmawati (2004)	CG Terhadap Kinerja Perusahaan	<i>Corporate Governance</i> Tobin's Q (Kinerja Pasar) dan ROE (Kinerja Operasional)	Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada hubungan signifikan CG dengan kinerja pasar namun berpengaruh terhadap kinerja operasional.
2	Klapper dan Love (2002)	<i>Corporate governance investor protection, and performance in emerging markets</i>	Corporate Governance, Return On Assets (ROA) Dan Tobin's Q)	Adanya hubungan positif antara <i>corporate governance</i> dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan return on assets (ROA) dan Tobin's Q
3	Dewi Widiana Pribadi (2008)	Pengaruh CG terhadap kinerja perusahaan	Variabel dependen : - Kinerja keuangan (ROA, ROE, EVA. - Kinerja pasar (Tobin's Q dan Market to book value) Variabel independen : Corporate governance performance indeks (CGPI).	<i>Corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
4	Yuliana Hernis Tri Mulyani (2008)	Dampak <i>Good corporate governance</i> terhadap kinerja keuangan, volume	Variabel dependen : - Kinerja perusahaan (ROA, ROE, Tobin's Q - Reaksi pasar (<i>abnormal</i>	GCG berpengaruh signifikan positif terhadap ROA akan tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROE dan Tobin's Q. Pengujian terhadap volume

		perdagangan saham dan <i>abnormal return</i>	<i>return, trading volume activity</i>). Variabel independen : Dummy (CGPI), Laba, Aset, Utang, Ekuitas, <i>Actual return, Expected Return</i> , Jumlah Saham Beredar, dan Jumlah Saham Diperdagangkan.	perdagangan menunjukkan hasil yang tidak signifikan sedangkan terhadap abnormal return menunjukkan hasil yang signifikan positif sehingga mengindikasikan pengumuman CGI direksi oleh pasar.
5	Hastuti (2005)	Hubungan Antara <i>Good Corporate Governance</i> dan Struktur Kepemilikan dengan Kinerja Keuangan	GCG, Struktur Kepemilikan, Dan Kinerja Keuangan	Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara struktur kepemilikan dengan kinerja perusahaan, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara manajemen laba dengan kinerja dan terdapat hubungan yang signifikan antara <i>disclosure</i> dengan kinerja perusahaan
6	Cornet, Marcia and Alan J. (2006)	<i>Earning Managemen, CG, And True Financial Perfomance</i>	GCG Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.	Hasil menunjukkan bahwa penerapan GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA)
7	Md. Abdur Rouf	<i>The Relationship Between CG and Value Of The Firm In Developing Countries :</i>	Corporate Governance : Ukuran Dewan, Dewan Direksi Independen, CEO Duality, dan Dewan	- Adanya hubungan signifikan positif antara ROA dan dewan direksi independen, begitu juga CEO duality. - Adanya hubungan

		<i>Evidence From Bangladesh</i>	Komite Audit. Kinerja Perusahaan : ROA dan ROE	positif signifikan antara ROE dan dewan direksi independen, begitu juga CEO duality. - Tidak ada hubungan signifikan antara nilai perusahaan baik ROA maupun ROE terhadap ukuran dewan dan dewan komite audit.
8	Brown, Lawrence dan Caylor, J (2004)	<i>Corporate Governance and Firm Performance</i>	<i>Corporate Governance Score</i> Kinerja : ROE, Net Profit Margin, Sales Growth Dan Tobin's Q.	Hasil menunjukkan GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan.
9	Adel Bino & Shorouq Tomar	<i>Corporate Governance And Bank Performance : Evidence From Jordanian Banking Industry.</i>	Corporate Governance : Ownership Structure, Board Composition, and Board Size. Bank Performance (ROA dan ROE)	- Regresi menunjukkan bahwa struktur kepemilikan bank memiliki koefisien positif tetapi tidak signifikan (0,239) terhadap ROA - Regresi menunjukkan bahwa komposisi dewan direksi tidak mempengaruhi ROA bank, tidak memiliki koefisien yang signifikan (0,213). - Hasil regresi menunjukkan bahwa ada hubungan negatif tetapi tidak signifikan secara statistik antara jumlah anggota dewan direksi dan bank ROA (-0,00962)

2.5 PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.5.1 Pengaruh Persentase Jumlah Anggota Komisaris Independen Terhadap Kinerja Perusahaan

Fama dan Jensen (1993) menyatakan bahwa *non executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan antara manajer internal dan mengawasi kebijaksanaan direksi serta memberikan nasihat kepada direksi. Charlie et al (2000) berpendapat bahwa teori agensi menyatakan bahwa direktur non-eksekutif merupakan cara yang efektif untuk pemantauan para direktur eksekutif dan bahwa mereka mampu mengubah perilaku direktur eksekutif sehingga kepentingan pemegang saham yang diupayakan.

Berdasarkan teori keagenan, kehadiran komisaris independen merupakan mekanisme yang diharapkan dapat melakukan pengawasan dan mengontrol konflik kepentingan antara *controlling shareholders* dan *minority shareholders* sehingga terjadi efisiensi dalam manajemen perusahaan. Keputusan – keputusan yang dilakukan manajemen dapat sejalan sesuai tujuan yaitu memaksimalkan kinerja perusahaan. Teori ini didukung oleh beberapa peneliti antara lain yaitu penelitian Brown dan Caylor (2004) serta Black, Jang, dan Kim (2005) juga menyatakan bahwa jumlah komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kinerja keuangan perusahaan. Pearce dan Zahra (1992), menyatakan adanya hubungan positif antara keberadaan komsaris independen dalam dewan komsaris dengan kinerja perusahaan. Mereka berpendapat bahwa dengan memperbesar ukuran dewan komisaris serta merekrut komsaris independen yang

profesional maka perusahaan akan diuntungkan dari sisi keahlian dan pengalaman dimiliki oleh mereka. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Persentase Jumlah Anggota Komisaris Independen Berpengaruh Secara Positif *Return On Asset*

2.5.2 Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Perusahaan

Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG (KNKG, 2006). Collier dan Gregory (1999) berpendapat bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, semakin mudah untuk mengendalikan *Chief Executives Officer* (CEO) dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen.

Beberapa penelitian yang menemukan bukti adanya hubungan positif antara karakteristik dewan komisaris dengan kinerja perusahaan, antara lain Jaafar dan El-Shawa (2009) menemukan bahwa ukuran dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA dan Tobin's Q. Kedua, Irmala Sari (2010) yang menunjukkan bahwa secara statistik jumlah dewan komisaris berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ROA sebagai proksi kinerja perusahaan. Ketiga, Trisianto (2009) pada penelitiannya yang berjudul pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan menyatakan bahwa ukuran anggota dewan komisaris berpengaruh secara

signifikan dan positif terhadap kinerja perusahaan. Maka dapat dikatakan bahwa jumlah anggota dewan komisaris yang lebih besar akan mampu menjaga kepentingan para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya untuk terakomodasi dengan baik, sehingga akan meminimalisir terjadinya *agency conflict* antara pemegang saham dengan dewan direksi. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Jumlah Anggota Dewan Komisaris Berpengaruh Secara Positif Terhadap *Return On Asset*

2.5.3 Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Direksi Terhadap Kinerja Perusahaan

Dewan direksi merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan *corporate governance* yang bertugas dan bertanggungjawab untuk menjalankan manajemen perusahaan. Hermalin dan Weisbach (2003) mengatakan bahwa jumlah anggota dewan direktur umumnya berhubungan dengan implikasi dari kebijakan mengenai batasan jumlah dewan direktur. Dalton et al. (1999) menyatakan adanya hubungan signifikan positif antara ukuran dewan dengan kinerja perusahaan. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Jumlah Anggota Dewan Direksi Berpengaruh Secara Positif Terhadap *Return On Asset*

2.5.4 Pengaruh Persentase Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan

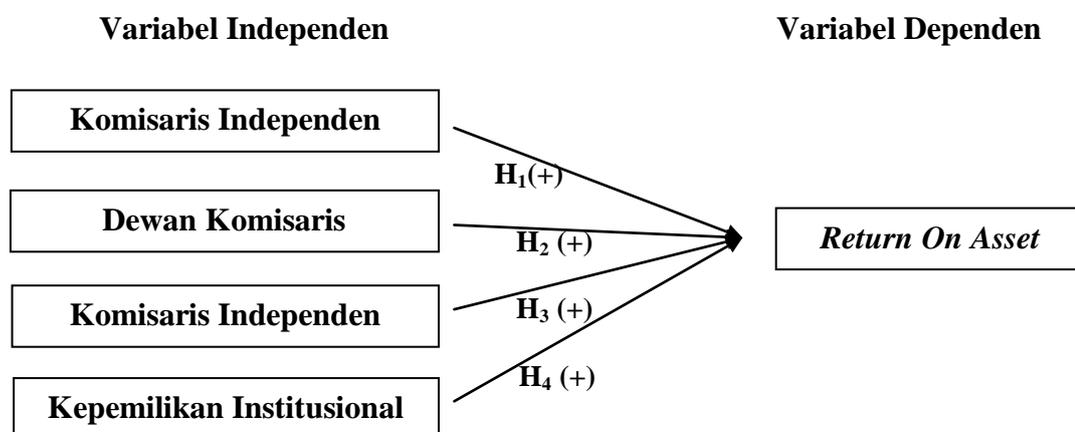
Pound (1988) mengeksplorasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan dan menemukan bahwa adanya hubungan positif antara kepemilikan saham institusional dan kinerja perusahaan. McConnel dan Servaes (1990), di sisi lain, laporan bahwa ada hubungan positif antara nilai perusahaan dan kepemilikan oleh investor institusional. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Persentase Kepemilikan Institusional Berpengaruh Secara Positif *Return On Asset*

2.6 KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan pengembangan hipotesis yang dikemukakan diatas, maka dapat dibentuk kerangka pemikiran dalam penelitian adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1
Kerangka pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.6 VARIABEL PENELITIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL

Penelitian ini melibatkan variabel yang terdiri dari empat variabel bebas (independen), satu variabel terikat (dependen) dan satu variabel kontrol. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi persentase jumlah anggota Komisaris Independen, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Dewan Direksi dan persentase Kepemilikan Institusional. Variabel dependennya adalah kinerja perusahaan perbankan yang diukur oleh ROA.

3.6.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan. Salah satu alternatif yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan adalah ROA. variabel ini dipilih oleh penulis karena merupakan rasio yang mengukur kinerja perusahaan dilihat dari pendapatan perusahaan dalam hubungannya dengan semua sumber daya itu pada bagian disposal (modal pemegang saham ditambah dana jangka pendek dan panjang yang dipinjam). Jika perusahaan tidak memiliki utang, maka laba atas aset dan laba atas ekuitas akan sama. Suatu indikator bagaimana keuntungan perusahaan relatif terhadap total aset. ROA memberikan ide mengenai bagaimana manajemen yang efisien menggunakan aset-asetnya untuk menghasilkan penghasilan. Berikut rumus ROA berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP Lampiran 14.

$$\text{Return On Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - Rata Total Aset}} \quad \dots (3.1)$$

3.6.2 Variabel Independen

3.6.2.1 Komisaris Independen (KIND)

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki ikatan dengan manajemen perusahaan sehingga dengan adanya komisaris independen, fungsi pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadap direksi diharapkan menjadi dapat lebih objektif dan seksama. Perusahaan yang memiliki jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya sebesar 50%, dari keseluruhan anggota dewan komisaris yang ada, berarti perusahaan itu telah memenuhi pedoman GCG, guna menjaga independensi serta pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat. Ukuran tersebut mengacu pada PBI 2006 mengenai pelaksanaan GCG bagi bank umum. Mengacu pada Wulandari, (2006:128) dan Fama dan Jensen (1983, dalam Kiel dan Nicholson, 2003, dalam Prayudhanto, 2009), maka ukuran komisaris independen dihitung dengan cara memprosentasekan jumlah komisaris yang berasal dari luar perusahaan (komisaris independen) terhadap total jumlah anggota dewan komisaris perusahaan :

$$\text{Persentase } \textit{Outside director} = \frac{\text{Jumlah Anggota Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}} \dots (3.2)$$

3.6.2.2 Jumlah Anggota Dewan Komisaris (DKOM)

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2008, tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, jumlah anggota dewan Komisaris pada perusahaan perbankan paling kurang 2 (dua) orang terdiri dari komisaris dan komisaris independen. Mengacu pada Ujiyanto dan Pramuka (2007) maka variabel ini diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris yang ada dalam perusahaan .

3.6.2.3 Jumlah Anggota Dewan Direksi (DDIR)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2008, jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang. Maka Ukuran dewan direksi diukur dengan jumlah anggota dewan direksi yang ada dalam perusahaan (Faisal, 2005).

3.6.2.4 Persentase Kepemilikan Institusional (KI)

Kepemilikan institusional merupakan porsi *outstanding share* yang dimiliki oleh investor terhadap jumlah seluruh modal saham yang beredar. pemilik memiliki kewenangan yang besar untuk memilih siapa-siapa yang akan duduk dalam manajemen yang selanjutnya akan menentukan arah kebijakan bank tersebut ke depan.

Struktur kepemilikan yang dimaksud dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok:

1. Kepemilikan bank manajerial yaitu kepemilikan saham yang dimiliki manajer, direksi, komisaris yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976).
2. Kepemilikan bank institusi yaitu kepemilikan saham yang dimiliki institusional dan *blockholders*. Institusional yang dimaksud misalnya LSM, pemerintah maupun swasta. *Blockholders* adalah kepemilikan individu atas nama perorangan diatas 5% tetapi tidak termasuk dalam kepemilikan *insider* (Fitri dan Mamduh, 2003 dalam Oktapiyani, 2009).

Maka persentase kepemilikan institusional diukur dengan persentase kepemilikan institusional yang ada dalam perusahaan.

3.6.3 Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan penjelasan definisi variabel-variabel yang telah dikemukakan diatas, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1
Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Rumus	Skala
1	<i>Return On Assets</i>	Rasio Antara Laba Sebelum Pajak Yang Disetahunkan Terhadap Rerata Total Asset.	$\frac{\text{EBIT}}{\text{Rerata Total Assets}}$	Rasio
2	Komisaris Independen	Persentase Jumlah Anggota Komisaris Independen Pada Dewan Komisaris	$\frac{\text{Jumlah Anggota Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}}$	Persen
3	Dewan Komisaris	Jumlah Anggota Dewan Komisaris	$\sum \text{Anggota Dewan Komisaris}$	Persen
4	Dewan Direksi	Jumlah Anggota Dewan Direksi	$\sum \text{Anggota Dewan Direksi}$	Persen
5	Kepemilikan Institusional	Persentase kepemilikan Institusional (pemerintah, kepemilikan asing, kepemilikan swasta)	$\sum \text{Persentase kepemilikan institusional}$	Persen

3.7 POPULASI DAN SAMPEL

Populasi adalah keseluruhan obyek psikologis yang dibatasi oleh kriteria tertentu, obyek psikologis merupakan obyek yang bisa diraba maupun obyek abstrak. Maka populasi penelitian ini adalah Bank Umum Konvensional yang terdaftar di Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia dari tahun 2005 sampai dengan 2009. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel dengan kriteria tertentu sesuai yang dikehendaki peneliti, kemudian dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai

dengan tujuan penelitian. Maka kriteria sampel yang akan diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan perbankan yang sudah *go public* atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2005-2009.
- 2) Masih beroperasi hingga tahun 2009.
- 3) Bank mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) untuk periode 31 Desember 2005-2009 di dalam website Bursa Efek Indonesia.
- 4) Bank mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) untuk periode 31 Desember 2005-2009 di dalam *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD).
- 5) Perusahaan yang mengungkapkan informasi mengenai *corporate governance*, dan rasio keuangan dalam laporan tahunannya.
- 6) Pemilihan rentang waktu bertujuan agar penelitian hanya berfokus pada rentang waktu tersebut sehingga hasil yang diperoleh akan maksimal.

Berdasarkan data dari BEI pada tahun 2005-2009 populasi perusahaan perbankan konvensional sebanyak 28 perusahaan. Berdasarkan kriteria sampel diatas maka dalam penelitian ini hanya digunakan sampel sebanyak 18 bank umum konvensional di Indonesia.

Tabel 3.2
Pemilihan Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Jumlah bank umum konvensional yang tercatat di BEI dari tahun 2005-2009	28
Perusahaan yang tidak masuk sebagai sampel:	
1. Tidak mempublikasikan dan /atau di delisting periode 2005	0
2. Tidak mempublikasikan dan /atau di delisting periode 2006	6
3. Tidak mempublikasikan dan /atau di delisting periode 2007	1
4. Tidak mempublikasikan dan /atau di delisting periode 2008	2
5. Tidak mempublikasikan dan /atau di delisting periode 2009	1
6. Tidak mengungkapkan informasi struktur kepemilikan, <i>corporate governance</i> , dan ROA.	0
Total Sampel	18

3.8 JENIS DAN SUMBER DATA

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan jenis data yang digunakan adalah kombinasi antara *time series* dan *cross section* data, yang disebut *pooling data* (Gujarati, 1991). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan perbankan (*annual report*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2005-2009, dapat dilihat pada situs resminya yaitu www.idx.co.id dan *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) periode 2005-2009.

3.9 METODE PENGUMPULAN DATA

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode dokumenter yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari catatan-catatan atau dokumen perusahaan (data sekunder) serta studi pustaka dari berbagai literatur dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan

dengan *good corporate governance*. Data sekunder berisi tentang data-data *annual report* yang mencakup data *corporate governance* (komposisi anggota dewan komisaris, komisaris independen, dewan direksi), kepemilikan saham institusional dan rasio keuangan (ROA) periode tahun 2005 - 2009. Pemilihan data tahun 2005-2009 dikarenakan adanya beberapa peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia mulai tahun 2006 mengenai penerapan *Good Corporate Governanve* bagi bank umum yakni Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang penerapan GCG bagi bank umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, serta adanya peristiwa krisis ekonomi global di beberapa periode dan berdampak pada perekonomian di Indonesia seperti krisis ekonomi Amerika, dan Yunani.

3.10 TEKNIK ANALISIS

3.10.1 Model penelitian

Dalam penelitian ini penulis berusaha meneliti hubungan komposisi Komisaris Independen, Dewan Komisaris, Dewan Direksi Dan Kepemilikan Institusional terhadap kinerja perusahaan (ROA), maka model penelitian adalah :

$$CP_{i,t} = \alpha + \beta_1 KIND_{i,t} + \beta_2 DKOM_{i,t} + \beta_3 DDR_{i,t} + \beta_4 KI_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad \dots(3.3)$$

Keterangan :

CP : *Corporate performance by ROA*

DKIND : *Percentace Board of Independent*

DKOM : *Jumlah Anggota Board of Commisers*

DDR : *Jumlah Anggota Board of Directors*

KI	: Persentase <i>Institutional Ownership</i>
α	: Intersep
β	: Slope
i	: Individu ke-i
t	: Periode waktu ke-t
ε	: <i>Error</i> /simpangan

Berdasarkan model diatas, maka dapat ditunjukkan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

$H_{01}: \beta_1; \beta_2; \beta_3 = 0$: Tidak ada perbedaan yang signifikan antara antara persentase jumlah anggota komisaris independen, jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota dewan direksi dan kepemilikan institusional terhadap ROA.

$H_{1.1}: \beta_1; \beta_2; \beta_3 \neq 0$: terdapat hubungan signifikan antara persentase jumlah anggota komisaris independen, jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota dewan direksi dan kepemilikan institusional terhadap ROA.

3.10.2 Uji Asumsi Klasik

3.10.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau *residual* mempunyai distribusi normal sebab uji t dan F mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal, jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada

dua cara mendeteksi ketidaknormalan suatu model regresi yaitu analisis grafik dan uji statistik.

Pada analisis grafik, normalitas dapat dilihat melalui normal probabilitas plot yang membanding distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Pada analisis statistik, salah satu metode pendekteksian yaitu Uji Non Parametrik Kolmogrov-Smirnov (KS). Jika nilai signifikan pada tabel $KS < 0.05\%$ maka residual tidak terdistribusi secara normal.

3.10.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara variabel bebas (independen). Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolinearitas dapat diketahui dengan beberapa cara salah satunya dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) yang dihasilkan oleh variabel-variabel independen (Gozali, 2009).

3.10.2.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan pelanggaran asumsi dimana terdapat korelasi serial antar *error*. Menurut Ghazali (2009:79) dalam pengujian autokorelasi ada

beberapa cara dalam mendeteksi adanya autokorelasi, yaitu *Durbin Watson statistic*. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi, sebagai berikut :

- a. Jika $0 < d < d_L$, maka tidak ada autokorelasi positif, hipotesis di tolak.
- b. Jika $d_L \leq d \leq d_U$, maka tidak ada autokorelasi positif, tidak ada keputusan / tidak dapat disimpulkan.
- c. Jika $4-d_L < d < 4$, maka tidak ada autokorelasi negatif, hipotesis ditolak.
- d. Jika $4-d_U < d < 4-d_L$, maka tidak ada autokorelasi negatif, tidak dapat disimpulkan.
- e. Jika $d_U < d < 4-d_U$, maka tidak ada autokorelasi positif atau negatif

3.10.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2009: 35), uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Hal ini menyebabkan setiap observasi akan memiliki reliabilitas yang berbeda walaupun memiliki parameter yang sama. Sebagaimana asumsi model regresi linier klasik, suatu model regresi yang baik adalah yang homokedastis atau bebas dari masalah heterokedastisitas.

Pelanggaran heterokedastisitas dapat mendeteksi salah satunya dengan cara intuitif memperhatikan grafik plot dari error terhadap waktu dengan dasar analisis keputusan, yaitu (Ghozali, 2009;37):

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik – titik yang ada membentuk pola tertentu yang tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola tertentu, serta titik – titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y secara acak, maka mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas atau model homoskedastisitas.

Analisis dengan menggunakan grafik plot memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plot. Semakin sedikit jumlah pengamatan semakin sulit menginterpretasikan hasil grafik plot sehingga dibutuhkan Uji statistik yang lebih menjamin keakuratan hasil. Uji statistik yang dapat digunakan salah satunya adalah uji Park, yang memformalkan metode grafik plots dengan menyatakan bahwa variance merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Dasar penilaian pada uji park ini dengan melihat output SPSS pada tabel *coefficient* (setelah semua variabel diubah menjadi *logaritma natural*), jika nilai signifikan < 0.01 maka terdapat heteroskedastisitas, dan sebaliknya, jika nilai signifikan > 0.01 maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

Jika dalam pengujian asumsi Heteroskedastisitas terjadi pelanggaran dimana nilai signifikan $< 0,01$ maka dapat diobati dengan mengubah model regresi menjadi *semi-log* atau *double log*. Model regresi *Semi-Log* dilakukan dengan mengubah variabel independen atau mengubah dependen pada model regresi dalam bentuk *logaritma natural*, sedangkan *Double-Log* mengubah

semua variabel baik variabel independen maupun variabel dependen dalam *logaritma natural*.

3.10.3 Pengujian Hipotesis

3.10.3.1 Pengujian R^2

Dalam pengujian ini akan diuji sejauh mana variasi dari variabel terikat mampu dijelaskan oleh variabel terikat. Nilai R^2 merupakan fraksi dari variasi yang mampu dijelaskan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0-1%, dan jika nilainya mendekati 1 maka semakin baik. Kelemahan pada uji R^2 adalah bias terhadap jumlah independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel, maka nilai R^2 akan meningkat tanpa mempertimbangkan apakah variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, sehingga disarankan untuk menggunakan nilai *adjusted R^2* pada saat mengevaluasi. Pengujian dengan *adjusted R^2* secara obyektif melihat pengaruh penambahan variabel independen, apakah variabel tersebut mampu memperkuat variasi penjelasan variabel dependen. (Ghozali, 2009:15).

3.10.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Dalam pengujian ini akan menguji pengaruh semua variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen yang akan dilakukan dengan distribusi F. Signifikansi pengujian ini secara langsung dapat dilihat dari besarnya angka probabilitas. Jika *p-value* (F-statistik) lebih kecil dari α ($\alpha = 5\%$

atau 0,05) maka seluruh variabel independen secara bersamaan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikatnya. (Ghozali, 2009:16).

3.10.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Analisis statistik secara parsial digunakan untuk melihat signifikansi dari masing-masing variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variabel terikat pada model dengan menggunakan uji t, dimana hipotesis nol ($H_0 : \beta=0$) artinya nilai koefisien sama dengan nol, setelah hipotesis alternatif ($H_1 : \beta \neq 0$) artinya nilai koefisien berbeda dengan nol. Signifikansi ini secara langsung dapat dilihat dari besarnya angka probabilitas. Jika *p-value* (t-statistik) lebih kecil dari α ($\alpha = 5\%$ atau 0,05) maka variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau tolak H_0 .

Pada uji t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila t hitung $>$ dari t tabel atau probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\text{Sig} < 0,05$), maka H_a diterima dan H_0 ditolak, variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.
- b. Bila t hitung $<$ dari t tabel atau probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi ($\text{Sig} > 0,05$) maka H_a ditolak dan H_0 diterima, variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.